



PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju
Keren

RLPPD

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

TAHUN 2025



Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si
Bupati Mamuju

Yuki Permana, S.T
Wakil Bupati Mamuju



www.pembkabmamuju.go.id



[pembkab_mamuju](https://www.instagram.com/pembkab_mamuju)



[pembkabmamuju](https://www.facebook.com/pembkabmamuju)



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah yang mencerminkan dampak kebijakan dan program pemerintah. Penilaiannya didasarkan pada berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan IPM. Pengukuran ini penting untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah diukur dengan beberapa Indikator Kinerja Makro Sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,40	72.7	2.3
2.	Angka Kemiskinan	7,15	6.99	-0.16
3.	Angka Pengangguran	2,77	3.38	0.61
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,54	4.07	-2.47
5.	Pendapatan Perkapita	53,96	58,09	4.13
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,425	0,401	-0,024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, Tahun 2026

Capaian indikator kinerja diatas, menunjukkan dinamika pembangunan yang cukup progresif pada beberapa aspek strategis, meskipun masih terdapat tantangan pada indikator tertentu.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:



A. Urusan Pendidikan

1) Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	NA	66,37
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	NA	92,26
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	NA	100
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	NA	100
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	NA	100

Keterangan: Terdapat perbedaan indikator kinerja kunci pada tahun 2024

2) Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi Belanja Urusan Pendidikan yang terealisasi sebesar Rp. 415.476.067.288- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pengendalian perizinan pendidikan

3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usai Dini

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun

adapun masalah yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan Akses di Pedesaan: Di daerah pedesaan, angka partisipasi PAUD cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak tempuh yang jauh, kurangnya fasilitas transportasi, dan keterbatasan informasi



tentang pentingnya pendidikan usia dini

- Kurangnya Kesadaran Orang Tua: Banyak orang tua yang kurang memahami manfaat pendidikan usia dini bagi perkembangan anak. Hal ini menyebabkan partisipasi anak-anak dalam PAUD menjadi rendah
- Kualitas Layanan yang Tidak Merata: Kualitas layanan PAUD tidak merata di seluruh Indonesia. Ada daerah yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas tinggi, sedangkan ada juga daerah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung dapat menghambat peningkatan angka partisipasi PAUD

b. Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B

yang menjadi tantangan dan hambatan sehingga tahun berikutnya akan menjadi bahan evaluasi seperti :

- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan terlatih masih menjadi tantangan. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan diperlukan
- Kualitas Pengelolaan Satuan PAUD: Pengelolaan satuan PAUD yang kurang efisien dan kurang terstruktur dapat menghambat pencapaian akreditasi yang diinginkan. Peningkatan manajemen dan administrasi yang baik sangat diperlukan
- Akses dan Pemerataan Layanan: Pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD masih menjadi masalah di beberapa daerah. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai perlu diperhatikan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya finansial dan material juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas PAUD. Diperlukan dukungan finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan mutu.

c. Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4

- Ketersediaan Calon Guru: Kurangnya jumlah lulusan S1 atau D4 yang memilih karir sebagai guru PAUD menjadi hambatan utama. Banyak



calon guru yang lebih memilih karir di luar bidang Pendidikan

- **Kompensasi dan Karir:** Kompensasi yang diterima oleh guru PAUD sering kali lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain, sehingga menurunkan daya tarik calon baru. Peningkatan kompensasi dan peluang karir yang lebih baik dapat menjadi Solusi
- **Pengembangan Profesional:** Guru PAUD memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Program pelatihan dan pengembangan yang efektif perlu diterapkan secara terus-menerus.
- **Perubahan Sosial dan Teknologi:** Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat juga menjadi tantangan dalam menghasilkan guru PAUD yang mampu menghadapi dinamika zaman.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan usia dari 7 sd 15 tahun anatar lain jenjang pendidikan dasar usia 7 sd 12 tahun dan jenjang pendidikan SMP usia 13 sd 15 tahun Hal ini disebabkan antara lain :

- **Akses ke Pendidikan:** Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil atau terpinggirkan, akses ke sekolah masih menjadi masalah. Anak-anak mungkin harus menempuh jarak yang jauh atau menghadapi kendala transportasi
- **Kualitas Guru:** Ketersediaan guru yang kompeten dan berkualitas masih menjadi tantangan. Banyak guru yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai untuk mengajar sesuai standar yang diharapkan
- **Sarana dan Prasarana:** Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, seperti ruang kelas yang kurang, fasilitas sanitasi yang buruk, dan keterbatasan alat pembelajaran, dapat menghambat proses belajar mengajar
- **Kurangnya Dukungan Keluarga:** Dukungan dari keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Namun, beberapa keluarga mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan anak-anak mereka karena berbagai alasan, seperti kesibukan kerja atau



kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pendidikan

- Perubahan Teknologi dan Sosial: Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru bagi pendidikan, seperti adaptasi terhadap metode pembelajaran digital. Selain itu, perubahan sosial juga memengaruhi lingkungan belajar anak.
- Kesehatan dan Gizi: Kondisi kesehatan dan gizi anak-anak juga memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan baik. Masalah kesehatan atau kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan kognitif dan fisik anak

a. Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP

adapun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Akses Terhadap Buku dan Bahan Bacaan
Kurangnya Perpustakaan seperti Banyak sekolah yang tidak memiliki perpustakaan atau koleksi buku yang memadai dan Harga Buku: Harga buku yang tinggi sering kali menjadi kendala bagi keluarga untuk membeli bahan bacaan tambahan.
- Kualitas Pengajaran
Metode Pengajaran yang kurang menarik dan monoton dapat membuat siswa kurang tertarik untuk belajar membaca dan menulis dan Keterampilan Guru: Tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai dalam mengajar literasi, terutama di daerah-daerah terpencil
- Motivasi Siswa
Kurangnya Minat Baca: Beberapa siswa memiliki minat baca yang rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya paparan terhadap kegiatan membaca sejak dini dan Kondisi Sosial-Ekonomi: Siswa dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rendah mungkin kurang mendapatkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan literasi.
- Lingkungan Belajar
Kondisi Kelas: Ruang kelas yang kurang kondusif, seperti terlalu ramai atau tidak nyaman, dapat mengganggu konsentrasi siswa dan Teknologi: Meskipun teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif, penggunaan yang tidak tepat atau kurangnya akses terhadap teknologi juga bisa menjadi hambatan.



- Pengaruh Sosial dan Budaya:
Budaya Membaca: Kurangnya budaya membaca di lingkungan sosial siswa dapat mempengaruhi minat dan kemampuan literasi mereka
- c. Skor Kemampuan Numerasi SD dan SMP
adapun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :
 - Materi yang tidak aplikatif untuk kehidupan sehari-hari
 - Kurangnya minat siswa terhadap matematika
 - Kurangnya latihan soal berbasis numerasi
 - Kurangnya pemahaman guru tentang konsep numerasi
- d. Skor Iklim Inklusivitas SD dan SMP
adapun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :
 - Keterbatasan Fasilitas: Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus
 - Keterbatasan Fasilitas: Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus
 - Stigma dan Diskriminasi: Siswa dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda sering menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari teman sekelas maupun dari staf sekolah.
 - Keterbatasan Kurikulum: Kurikulum yang ada seringkali tidak fleksibel atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga sulit untuk mencapai inklusivitas penuh
- e. Iklim Keamanan SD dan SMP
adapun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :
 - Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan
Guru dan staf mungkin kurang memahami pentingnya keamanan sekolah atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat.
 - Infrastruktur yang Tidak Memadai
Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas fisik yang mendukung keamanan, seperti pagar, CCTV, atau sistem alarm.
 - Kejadian Bullying dan Kekerasan



Kekerasan dan perundungan (bullying) dapat mengancam keamanan siswa dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman.

- Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan Mental

Siswa yang mengalami masalah emosional atau mental mungkin tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan mental.

- f. Iklim Kebinekaan SD dan SMP

Adapun hambatan dan tantangan antara lain :

- Stereotip dan Prasangka: Adanya stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu dapat menghambat terciptanya kebinekaan
- Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial di luar sekolah yang kurang mendukung nilai-nilai kebinekaan juga dapat mempengaruhi siswa

- 3. Kesetaraan usia 7 sd 18 tahun

Angka partisipasi sekolah usia 7 sd 18 tahun kesetaraan dengan factor yang mempengaruhi masih rendahnya APS kesetaraan ini antara lain :

- Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Minimnya Pendidikan Kesetaraan: Banyak individu yang kurang mendapatkan pendidikan mengenai pentingnya kesetaraan gender, etnis, agama, dan lain-lain

Stereotip dan Prasangka: Adanya stereotip dan prasangka yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa menjadi penghalang bagi partisipasi yang setara

- Budaya dan Norma Sosial

Norma Tradisional: Norma tradisional dan budaya patriarki masih kuat di beberapa masyarakat, membatasi peran dan partisipasi kelompok tertentu

Tekanan Sosial: Tekanan sosial untuk mematuhi norma-norma yang ada dapat menghambat individu untuk berpartisipasi secara setara

- Hambatan Ekonomi



Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali menghambat partisipasi kesetaraan, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung

Beban Kerja Ganda: Beban kerja ganda, terutama pada wanita yang harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga, dapat menghambat partisipasi mereka

- Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang Tidak Merata: Ketidakmerataan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menghambat partisipasi kesetaraan

Kurangnya Pelatihan dan Kesempatan: Kurangnya pelatihan dan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan

- Kurangnya Peran Model:

Ketidakhadiran Role Model yaitu Kurangnya figur atau role model yang berhasil dalam mencapai kesetaraan dapat mengurangi motivasi individu untuk berpartisipasi

B. Urusan Kesehatan

1) Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kematian ibu	NA	0,09
2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	NA	89,25
3	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	NA	72,51
4	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	NA	87,18
5	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	100



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
6	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	NA	90,04
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	NA	29,16
8	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	NA	84,72
9	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	NA	98,24
10	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	NA	98,95
11	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	NA	80,83
12	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	NA	92,44
13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	NA	79,57
14	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	80,42

Keterangan: Terdapat perbedaan indikator kinerja kunci pada tahun 2024

2) Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tahun 2025, sebesar Rp. 192.980.663.051 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3) Permasalahan Yang Dihadapi

Berdasarkan analisis, beberapa permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju adalah:

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Mamuju masih lemah dan perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam mendukung pembangunan kesehatan.
2. Kompetensi tenaga kesehatan belum memadai, jumlah dan jenis



tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, serta distribusi tenaga kesehatan belum merata.

3. Sarana dan prasarana kesehatan dasar maupun rujukan masih terbatas.
4. Intensitas penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, dengan ancaman munculnya penyakit baru (*new emerging*) maupun penyakit lama yang kembali (*re-emerging*).
5. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat masih rendah.
6. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih terbatas, terutama bagi masyarakat miskin di daerah terpencil dengan kondisi geografis sulit dijangkau.
7. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) masih tinggi, yang dipengaruhi oleh faktor 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, dan terlambat mendapatkan penanganan).
8. Sosialisasi informasi program dan hasil kegiatan belum optimal

C. Urusan Pekerjaan Umum

1) Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	NA	21,86
2	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	NA	100
3	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	NA	39,17



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	NA	70,37
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	NA	73,99
6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	NA	0
7	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	NA	Tidak Dapat Dilaksanakan
8	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	NA	100
9	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	NA	Tidak Dapat Dilaksanakan
10	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	NA	40

Keterangan: Terdapat perbedaan indikator kinerja kunci pada tahun 2024

2) Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebesar Rp. 68.651.309.224 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengelolaan dan Pengembangan system penyediaan air minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pada indikator Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota DPUPR



kabupaten Mamuju tidak dapat menyajikan data tersebut di karenakan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , wilayah Pantai 0-12 Km merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan di atas 12 Km Merupakan Kewenangan Pusat, sehingga di nyatakan bahwa kewenangan Pantai kabupaten Mamuju tidak ada

- Pada indikator Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah,terdapat kendala dikarenakan tidak ada pemohon yang berkategori Masyarakat berpenghasilan rendah mengajukan persetujuan bangunan gedung dan mengajukan pembebasan retribusi persetujuan bangunan Gedung
- Pada indikator Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir tidak tersedia di karenakan tidak ada data valid dan penetapan luasan mengenai Kawasan permukiman yang masuk kategori rawan banjir

D. Urusan Perumahan

1) Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Perumahan yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	NA	45,45
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	NA	37,71
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	NA	0,41
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	NA	Tidak Dapat Dilaksanakan

Keterangan: Terdapat perbedaan indikator kinerja kunci pada tahun 2024



2) Realisasi Belanja Urusan Perumahan

Realisasi belanja Urusan Perumahan di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebesar Rp 4,134,142,964.- atau 87%. dengan program/kegiatan unggulan Sebagai Berikut :

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- Program Pengelolaan Tanah Kosong
- Program Penatagunaan Tanah

3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Urusan Perumahan di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Untuk Indikator Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pada Bidang Perumahan tidak memiliki kegiatan Bantuan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan pada Tahun Anggaran 2025, Hal tersebut dikarenakan pihak Pengembang atau Penyelenggara Perumahan yang Berada di Wilayah Kabupaten Mamuju, belum dapat memenuhi persyaratan dan administrasi teknis yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan Penyerahan serta Pengelolaan Prasarana, sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.yang Terdapat pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu).
- Pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, Hal ini disebabkan Adanya satu titik pekerjaan Pengerasan yang bermasalah dengan surat keterangan Hibah Lahan dari warga.



E. Urusan Trantibum Linmas

1) Capaian Kinerja

Capaian kinerja Urusan Trantibum Linmas yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	NA	33,33
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	NA	100,00
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	NA	100,00
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	NA	62,60
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	NA	100,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	88,41

Keterangan: Terdapat perbedaan indikator kinerja kunci pada tahun 2024

2) Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

a) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebesar 4.074.936.370 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 sebesar Rp. 3.810.488.974 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Program unggulan adalah Program Penanggulangan Bencana



3) Permasalahan Yang Dihadapi

a) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Masalah utama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) meliputi
 - keterbatasan anggaran operasional,
 - kekurangan sarana-prasarana,
 - Minimnya jumlah dan kapasitas personil Satpol PP,
 - Tingginya angka pelanggaran Perda dan kurangnya partisipasi masyarakat sering menghambat penegakan aturan secara optimal
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menghadapi kendala utama berupa :
 - Akses lokasi yang sulit (jalan sempit/macet),
 - keterbatasan sarana prasarana (armada/APD),
 - Jarak pasokan air, dengan Lokasi Kebakaran
 - Masih Kurangnya edukasi masyarakat mengenai jalur evakuasi.,
 - Terbatasnya jumlah personel sering menyebabkan keterlambatan respon, terutama di wilayah padat

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Belum Tersedianya Peta Resiko Bencana
- Belum Tersedianya Penetapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
- Belum tersedianya Penetapan dokumen Kajian Resiko Bencana
- Renkon yang BPBD miliki saat ini hanya Dokumen RENKON Gempa Bumi belum Per ancaman
- Masih kurangnya Sistem Peringatan Dini Perancaman



- Belum optimalnya rencana evakuasi jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara
- Belum optimalnya penyediaan logistik bantuan selama masa tanggap darurat
- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

F. Urusan Sosial

1) Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	100,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	100,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	100,00
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	100,00
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	NA	100,00
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	NA	100,00

Keterangan: Terdapat perbedaan indikator kinerja kunci pada tahun 2024

2) Realisasi Belanja Urusan Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Tahun 2025 sebesar Rp.160.586.340 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi sosial
2. Program Penanganan Bencana

3) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Kurangnya tenaga Peksos



- Sarana dan Prasarana yang tidak memadai
- Update data terlambat dari Desa dan Kelurahan
- Data lansia yang dominan lansia tunggal
- Data kependudukan yang tidak padan

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Berdasarkan hasil evaluasi LPPD Tahun 2024, Kabupaten Mamuju memperoleh nilai sebesar 3,1697 dengan kategori Sedang. Sementara itu, untuk capaian nilai LPPD Tahun 2025, hingga saat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan, hasil evaluasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait nilai LPPD Tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga nilai capaian indikator tersebut belum dapat disajikan secara resmi dalam laporan ini. Meskipun demikian, dengan memperhatikan tren kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang relatif stabil, capaian LPPD Tahun 2025 diasumsikan masih berada pada kategori sedang, meskipun target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mamuju adalah kategori sangat tinggi, sehingga masih diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
2. Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09.B/LHP/XIX.MAM/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 Kabupaten berhasil mendapatkan Opini Wajar. Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (*Unaudited*) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kabupaten Mamuju Tahun 2025 mencapai sebesar 1.183.765.920.425,29 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 mencapai Rp1.157.741.079.299,85 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :



Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	140.374.957.869,00	140.369.381.549,29	99,99
4.2	Pendapatan Transfer	1.050.583.075.859,00	1.041.421.148.897,00	99,13
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.955.852.999,00	1.975.389.979,00	101
Jumlah		1.192.913.886.727,00	1.183.765.920.425,29	99,23

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1	Belanja Operasi	869.814.860.837,44	819.274.151.489,85	94,18
5.2	Belanja Modal	204.320.663.608,00	185.513.926.565,00	90,79
5.3	Belanja Tidak Terduga	680.000.000,00	109.293.041,00	16,07
5.4	Belanja Transfer	157.058.953.857,00	152.843.708.204,00	97,31
Jumlah		1.231.874.478.302,44	1.157.741.079.299,85	93,98

5. INOVASI DAERAH

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Mamuju terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan berbagai inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Inovasi-inovasi tersebut mencakup aspek digitalisasi pelayanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan, serta penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Adapun inovasi daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Inspektorat Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah Berbasis QR Code (Inter Code)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah melalui penggunaan QR Code dalam menginventarisir Barang Milik Daerah
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Kabupaten Mamuju	SAPO TANI (Sistem Agronomi Produk)	SAPO TANI (Sistem Agronomi Produk Tanaman Holtikultura Berbasis IoT) adalah sebuah konsep atau prototipe sistem <i>smart</i>



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Tanaman Holtikultura Berbasis IoT)	<i>farming</i> yang dirancang untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan budidaya tanaman hortikultura (sayuran, buah-buahan, dll.) menggunakan teknologi <i>Internet of Things</i> (IoT).
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	SUSTER KEREN	Inovasinya “SUSTER KEREN” merupakan singkatan dari Sehari Untuk Sehat TERkendali, KEnali Risikonya adalah sebuah kegiatan Dimana dalam sehari sesuai jadwal yang telah disepakati dilaksanakan pelayanan kepada Masyarakat dan dilaksanakan di Posyandu terpilih dengan melibatkan seluruh program UKM dan UKP/ Puskesmas. Inovasi SUSTER KEREN ini, dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan, promosi dan skrining serta pengobatan dalam upaya pencegahan meningkatkan derajat Kesehatan serta secara signifikan meningkatkan cakupan pelayanan. Setiap jadwal dan lokasi dimana dilaksanakan SUSTER KEREN akan selalu dipadati oleh Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	TELAGA KEREN	TELAGA KEREN akronim dari (Temukan, kawal dan jaGA Kesehatan bumil cegah Risiko kelahiran bayi StuNting baru)



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Adalah menemukan ibu hamil disetiap lingkungan untuk didampingi mulai awal masa kehamilan untuk tetap mendapatkan layanan dan edukasi kesehatan untuk mencegah ibu hamil kekurangan energy kronik sehingga ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang standar hingga 1000HPK anak
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	GERMAS ASEK	(Adaptasi Germas Hidup Sehat) adalah program unggulan Dinas Kesehatan Mamuju untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kebiasaan sehat, sesuai Instruksi Presiden No. 1/2017. Program ini fokus pada aktivitas fisik, pola makan sehat, dan pemeriksaan kesehatan berkala, yang terbukti meningkatkan tren penerapan SPM dan IKS.
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	TAKI ASUH STUNTING	Program Inovasi taki asuh stunting ini merupakan salah upaya penanganan stunting. Dengan menggandeng Sejumlah Aparatur Sipil Negara Setingkat Pejabat Eselon 2 Dan 3, Para Kepala Desa/Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, PKBM, dan tentu saja termasuk Bupati dan Wakil Bupati, akan mendapat tanggung jawab menjadi orang tua asuh bagi sasaran Stunting



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
7	Dinas Sosial	LARIS MANIS (Layanan Rehabilitasi Sosial Anak Melalui Assesment dan Pendampingan Terintegrasi)	Rangkaian kegiatan Inovasi “ LARIS MANIS “ (Layana Rehabilitasi Sosial Anak Melalui Assesmen dan Pendampingan Terintegrasi) Dinas Sosial yang menangani kegiatan tersebut dan telah melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial kami melayani Anak Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Anak Korban Bencana, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Anak Korban Narkotika dan zat Adiktif lainnya, serta telah melakukan Assesment, Respon Kasus, Pendampingan, Pemberian Bantuan Permakanan (sembako) maupun fasilitasi layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, serta monitoring dan evaluasi.
8	Ketahanan Pangan	GADIS PAK RAHMAN (Gerakan Distribusi Pangan Pokok Murah & Aman)	Inovasi Gerakan Disitribusi Pangan Pokok Murah & Aman (Gadis Pak Rahman), adalah salah satu langkah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok yang bertujuan agar mudah dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah dengan harga yang lebih murah yang disebabkan kurangnya jumlah pasokan dan tingginya permintaan pasar, sangat berpengaruh pada stabilisasi harga pangan.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
9	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	LOPIS (Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Aplikasi atau Website layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamuju, sebuah layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang memudahkan masyarakat Kabupaten Mamuju melakukan pengurusan layanan administrasi kependudukan secara online melalui laman http://lopis.dukcapil.mamujukab.go.id/
10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	JEBOL UMKM (Jemput Bola Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Program inovasi yang dikembangkan oleh DMPTSP Mamuju dengan mengunjungi langsung para pelaku UMKM di tempat usahanya dan membantu menerbitkan NIB secara gratis ditempat usaha masing masing
11	Pekerjaan umum dan penataan ruang	MAMUJU BERGEMASS (Mamuju Bergerak Bersama Masyarakat Gapai Air Bersih & Sanitasi Sehat)	Inovasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi sehat masyarakat melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Inovasi ini dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
12	Dinas Pemberdayaan masyarakat desa	SIAP BERKOBAR (Asistensi APBDES Berbasis Kolaborasi)	Siap Berkobar adalah salah satu bentuk Inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju dalam melakukan tugas Pembinaan Perencanaan Pembangunan kepada Pemerintah Desa dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan Asistensi APBDes
13	Badan Pendapatan Daerah	Elektronifikasi E-NPWP (Termasuk didalamnya NPWP, Payment Management System, BPHTB Online, Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah)	E-NPWP adalah layanan elektronik yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, dalam Pengintegrasian data pajak daerah berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dengan beberapa jenis layanan pajak seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melalui laman http://bapenda.mamujukab.go.id/



6. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Kabupaten Mamuju memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

No	Tanggal	Judul Penghargaan	Dokumentasi
	24 Maret 2025	Kabupaten Mamuju kembali meraih hasil baik dalam penilaian Daerah Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2023.	
	27 Mei 2025	Kabupaten Mamuju Menjadi Daerah Terbaik Se-Indonesia dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Pemerintah Kabupaten Mamuju menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.	
	27 Mei 2025	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2024. Di Aula Kantor BPK RI Sulbar	



No	Tanggal	Judul Penghargaan	Dokumentasi
	27 Januari 2026	Kabupaten Mamuju menerima penghargaan Universal Health Coverage Award kategori Madya untuk ke3 kalinya atas prestasi pemberian jaminan kesehatan pada lebih dari 98% masyarakat pada tahun 2025. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	
	8 Agustus 2025	Kabupaten Mamuju mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)	
	12–15 November 2025	Kabupaten Mamuju kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Pada Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Scale Up Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Lokus GC-7 Global Fund Tahun 2025, Mamuju dinobatkan sebagai Daerah dengan pemaparan terbaik. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto	
	17 November 2025	Mamuju meraih Penghargaan Pencapaian Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.	



No	Tanggal	Judul Penghargaan	Dokumentasi
	17 November 2025	Kabupaten Mamuju mendapatkan Penghargaan Pencapaian Indikator Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging dan Dokumen Rekomendasi Program Surveilans Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.	
	17 November 2025	Kabupaten Mamuju mendapatkan Penghargaan Keberhasilan Mencapai Target Penemuan Kasus AFP dan Campak Rubella Triwulan III Program Surveilans PD3I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat	
	17 November 2025	Kabupaten Mamuju mendapatkan penghargaan kategori Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, yang diberikan kepada Posyandu Asoka, Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga. Posyandu ini dinilai unggul dalam pelayanan kesehatan, inovasi kegiatan, serta peran aktif Masyarakat Tingkat Provinsi Sulawesi Barat	

7. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan ikhtisar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025, yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret 2025. Laporan ini kemudian dievaluasi secara nasional melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) guna mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju tahun 2025 telah berjalan dengan baik, sebagaimana tercermin dari berbagai capaian pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen, kerja keras, serta sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung berbagai program dan kebijakan yang telah dicanangkan.

Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari seluruh pihak dalam memberikan masukan dan saran konstruktif guna menyempurnakan strategi pembangunan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung pembangunan Kabupaten Mamuju. Semoga sinergi yang telah terjalin ini terus diperkuat demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Mamuju, 29 Maret 2026

BUPATI MAMUJU

Dr. Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si.



PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

Mamuju
Keren



www.pembkabmamuju.go.id



[pembkab_mamuju](https://www.instagram.com/pembkab_mamuju)



[pembkabmamuju](https://www.facebook.com/pembkabmamuju)